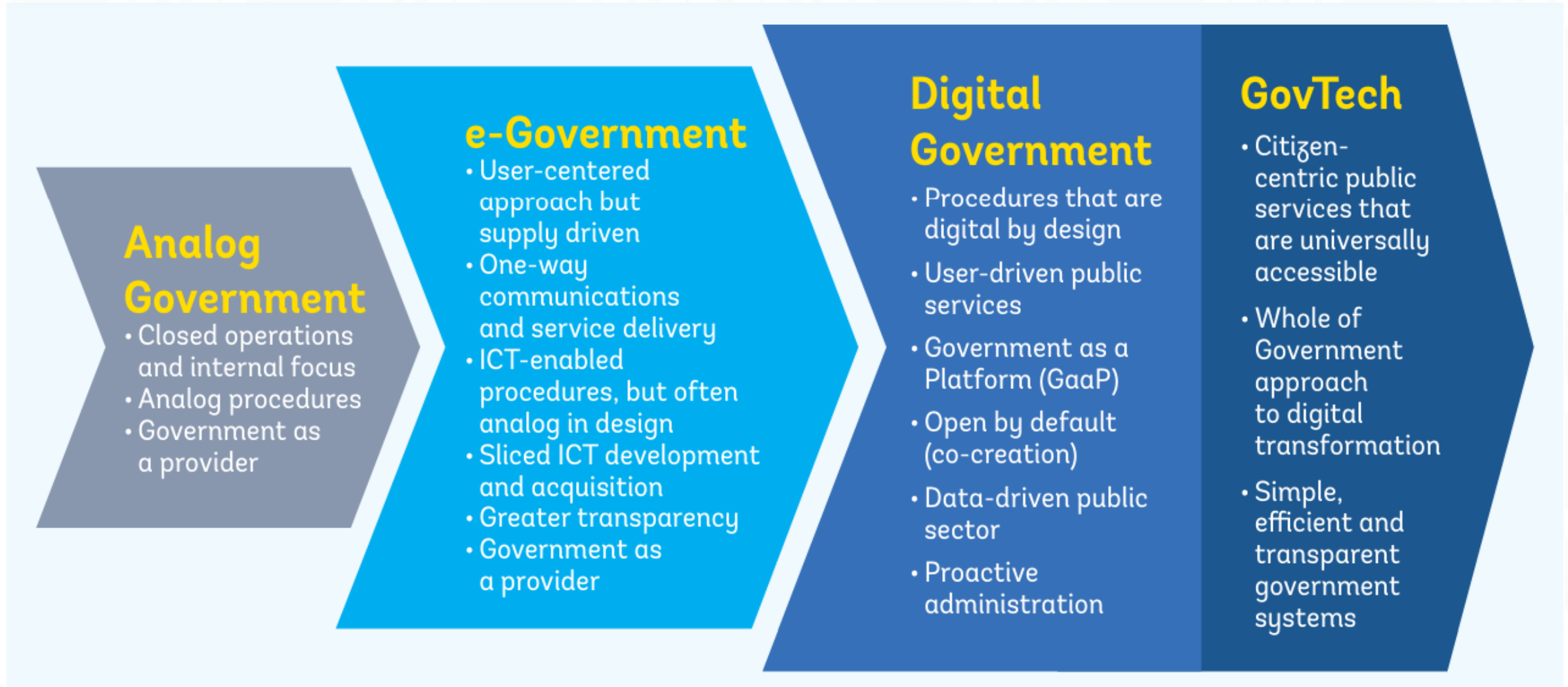




Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029

**Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi
Kementerian PPN/Bappenas**

Jakarta, 30 Oktober 2024



OECD: Kerangka Kebijakan Pemerintah Digital

PROACTIVENESS

Sikap proaktif mencerminkan kemampuan **pemerintah dan ASN untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan meresponsnya dengan cepat** sehingga pengguna tidak perlu terlibat dalam proses penyediaan data dan layanan yang rumit

USER DRIVEN

Pemerintahan menjadi lebih berorientasi pada pengguna (user-driven) dengan memberikan **peran sentral pada kebutuhan dan kenyamanan masyarakat** dalam membentuk proses, layanan, dan kebijakan; dan dengan mengadopsi mekanisme inklusif agar hal ini bisa terwujud.

OPEN BY DEFAULT

Pemerintahan bersifat terbuka dalam hal **penyediaan data pemerintah dan proses penyusunan kebijakan (termasuk algoritma) terbuka bagi masyarakat untuk terlibat**, sesuai dengan batasan peraturan yang ada dan seimbang dengan kepentingan nasional dan publik

PEMERINTAHAN DIGITAL

Pemerintahan yang didesain khusus secara digital dibentuk melalui kejelasan kepemimpinan organisasi dipadukan dengan mekanisme koordinasi dan penegakan yang efektif

DIGITAL BY DESIGN

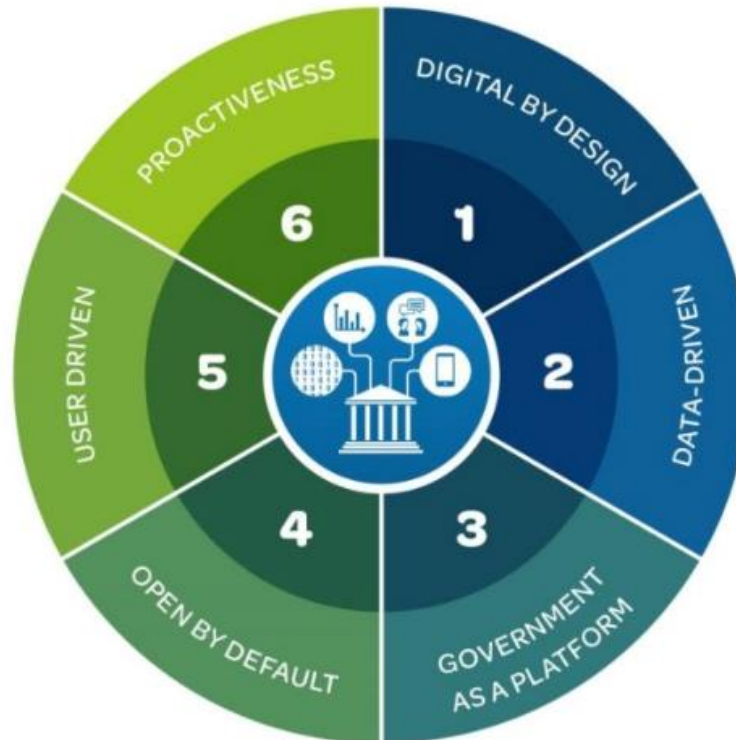
- **Pemerintahan yang khusus didesain secara digital** dibentuk melalui kejelasan kepemimpinan organisasi dipadukan dengan mekanisme koordinasi dan penegakan yang efektif
- Digitalisasi tidak hanya merupakan topik teknis melainkan juga menjadi **elemen wajib transformatif dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan**

DATA-DRIVEN

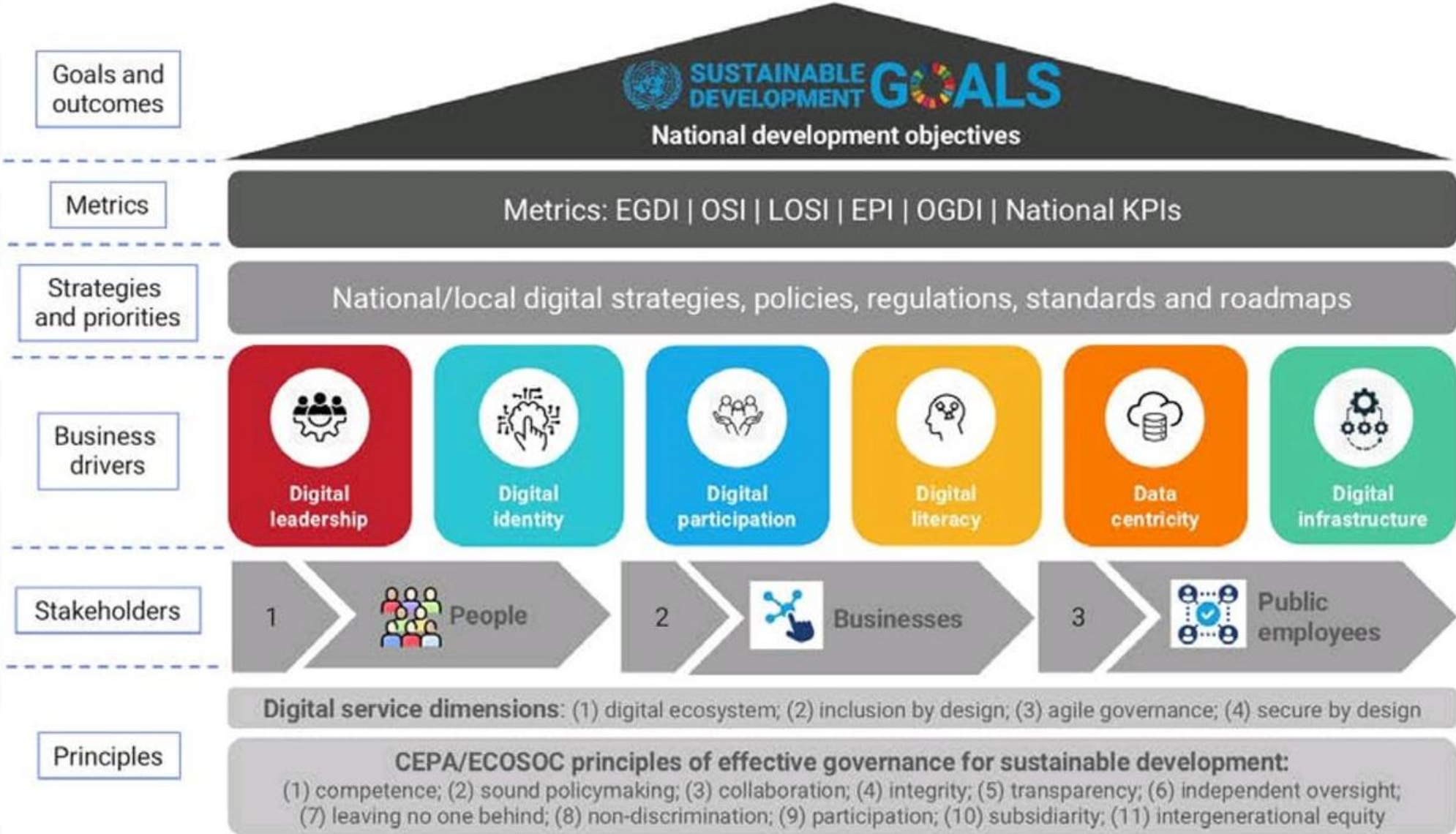
Mmahami pentingnya data sebagai **aset strategis utama** dalam menghasilkan nilai publik melalui penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan publik, serta mengadopsi aturan dan prinsip etika agar penggunaannya aman dan dapat dipercaya

GOVERNMENT AS A PLATFORM

Pemerintah berperan sebagai platform dilakukan menggunakan pedoman, **perangkat, data dan perangkat lunak yang jelas dan transparan** untuk menghasilkan pelayanan sesuai keinginan pengguna, konsisten, lancar, proaktif dan lintas sektoral



United Nation Digital Government Framework



Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024: Ekosistem Transformasi Digital

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Berkelanjutan dan Rendah Karbon (Ekonomi Hijau)

Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerataan Pembangunan

Inisiatif

Transformasi Digital

Proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan untuk memenuhi perubahan bisnis dan kebutuhan pasar

Pilar

Penuntasan Infrastruktur
TIK

- Perluasan Akses dan Kualitas Infrastruktur Digital (Middle dan Last Mile)
- Pusat Data Nasional
- Penyiaran Digital
- Penataan Frekuensi

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

- **Pemerintahan (SPBE)**
- Kesehatan
- Pendidikan
- Sosial
- Industri
- Pariwisata
- **Perdagangan, Perdesaan, Koperasi dan UMKM**
- Pertanian dan Perikanan
- Kota Cerdas (*SmartCity*)
- Sektor Prioritas Lainnya

Fasilitas Pendukung TIK

- *Big Data, Artificial Intelligence, IoT, Blockchain, Metaverse*
- Literasi Masyarakat
- *Fintech*
- Keamanan Siber
- Pengembangan SDM TIK
- Pengembangan Industri TIK
- *Research and Development*

Regulasi – Kelembagaan - Pendanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Urgensi



Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan



Menghilangkan duplikasi infrastruktur dan aplikasi TIK serta memperkuat keamanan informasi



Menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital nasional



Memudahkan integrasi layanan pemerintahan guna menumbuhkembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru



Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia

Solusi



Integrasi proses bisnis melalui penerapan arsitektur SPBE



Berbagi pakai infratraktur dan aplikasi TIK nasional



Digitalisasi layanan publik dan administrasi pemerintahan nasional



Pemanfaatan big data dan kecerdasan artifisial

Tindak Lanjut



Pembangunan arsitektur SPBE



Portal pelayanan publik terintegrasi



Portal pelayanan administrasi pemerintahan terintegrasi



Penyediaan pusat data nasional terintegrasi



Penyediaan jaringan intra pemerintah



Penyediaan layanan berbasis teknologi berbagi pakai



Pengembangan sistem keamanan informasi nasional



Peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE

Transformasi Digital Pemerintahan: Indonesia

Pemerintahan Analog

- Operasi tertutup dan fokus internal
- Prosedur analog
- Pemerintah sebagai penyedia

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

- Pendekatan yang berpusat pada pengguna tetapi didorong oleh pasokan
- Komunikasi satu arah dan penyampaian layanan
- Prosedur yang mendukung TIK tetapi sering kali memiliki desain analog
- Irisan pengembangan dan akuisisi TIK
- Pemerintah sebagai penyedia

- Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

Pemerintahan Digital

- Prosedur yang dirancang secara digital
- Pelayanan publik yang digerakkan oleh pengguna
- Pemerintah sebagai platform
- Terbuka (ko-kreasi)
- Sektor publik yang didorong oleh data
- Administrasi yang proaktif

Government Technology (GovTech)

- Pelayanan publik berpusat pada masyarakat yang dapat diakses secara universal
- Pendekatan keseluruhan pemerintah terhadap transformasi digital
- Sistem pemerintahan yang sederhana, efisien dan transparan

- Inpres 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Perpres 96/2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019
- Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia
- Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE
- UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- UU 1/2024 Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rencana Induk dan Arsitektur SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Pusat Data Nasional

Jaringan Nasional Intra Pemerintah

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Rencana Induk SPBE Nasional

Infrastruktur SPBE Nasional

Proses Bisnis SPBE

Rencana dan Anggaran SPBE

Data dan Informasi

Manajemen SPBE

Manajemen Risiko

Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen Data

Manajemen Aset TIK

Manajemen SDM

Manajemen Pengetahuan

Manajemen Perubahan

Manajemen Layanan

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022: Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Domain Layanan SPBE



Domain Proses Bisnis



Domain Data dan Informasi



Domain Infrastruktur SPBE

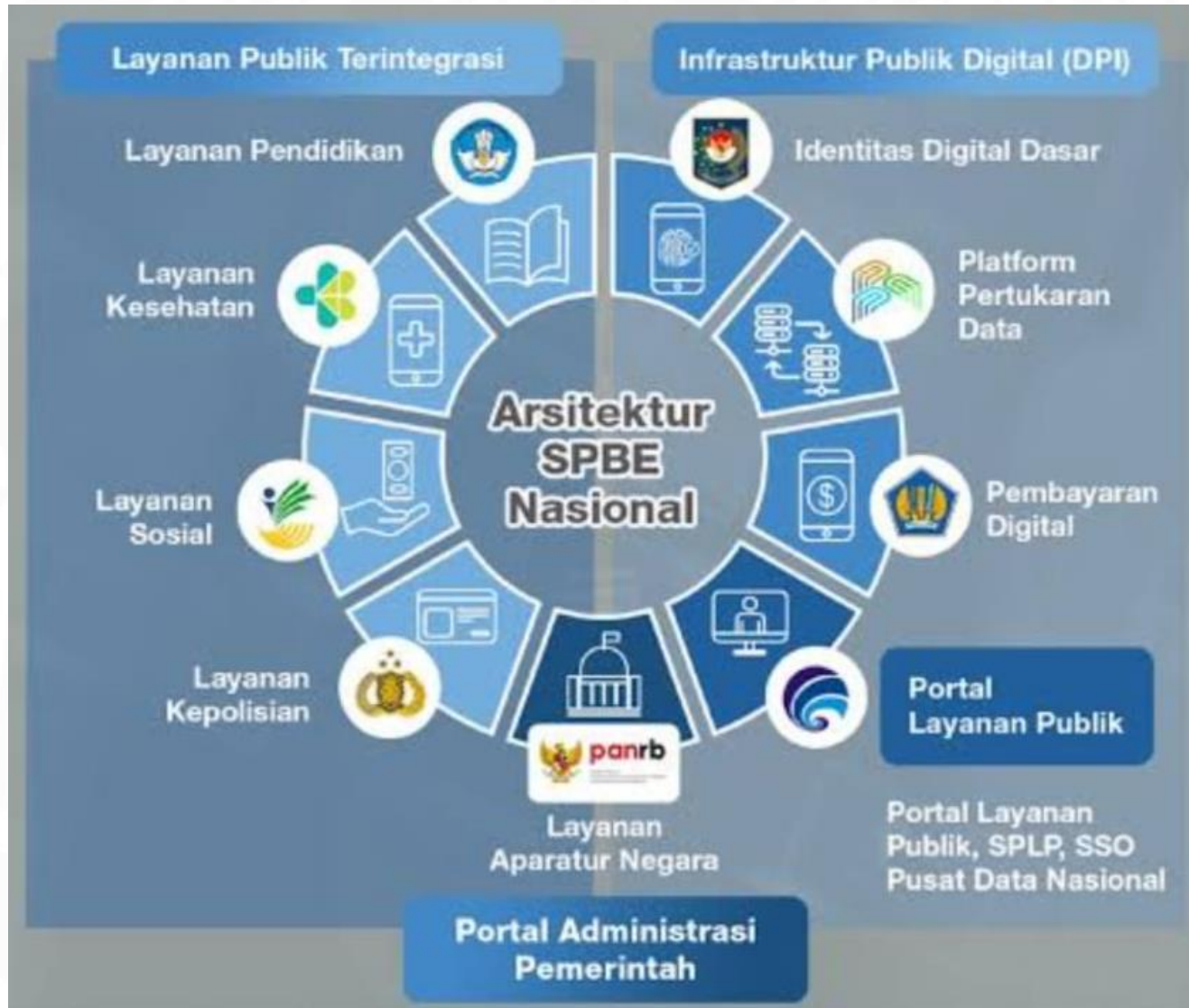


Domain Keamanan SPBE



**Domain
Aplikasi SPBE**

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023: Sembilan Layanan Prioritas SPBE

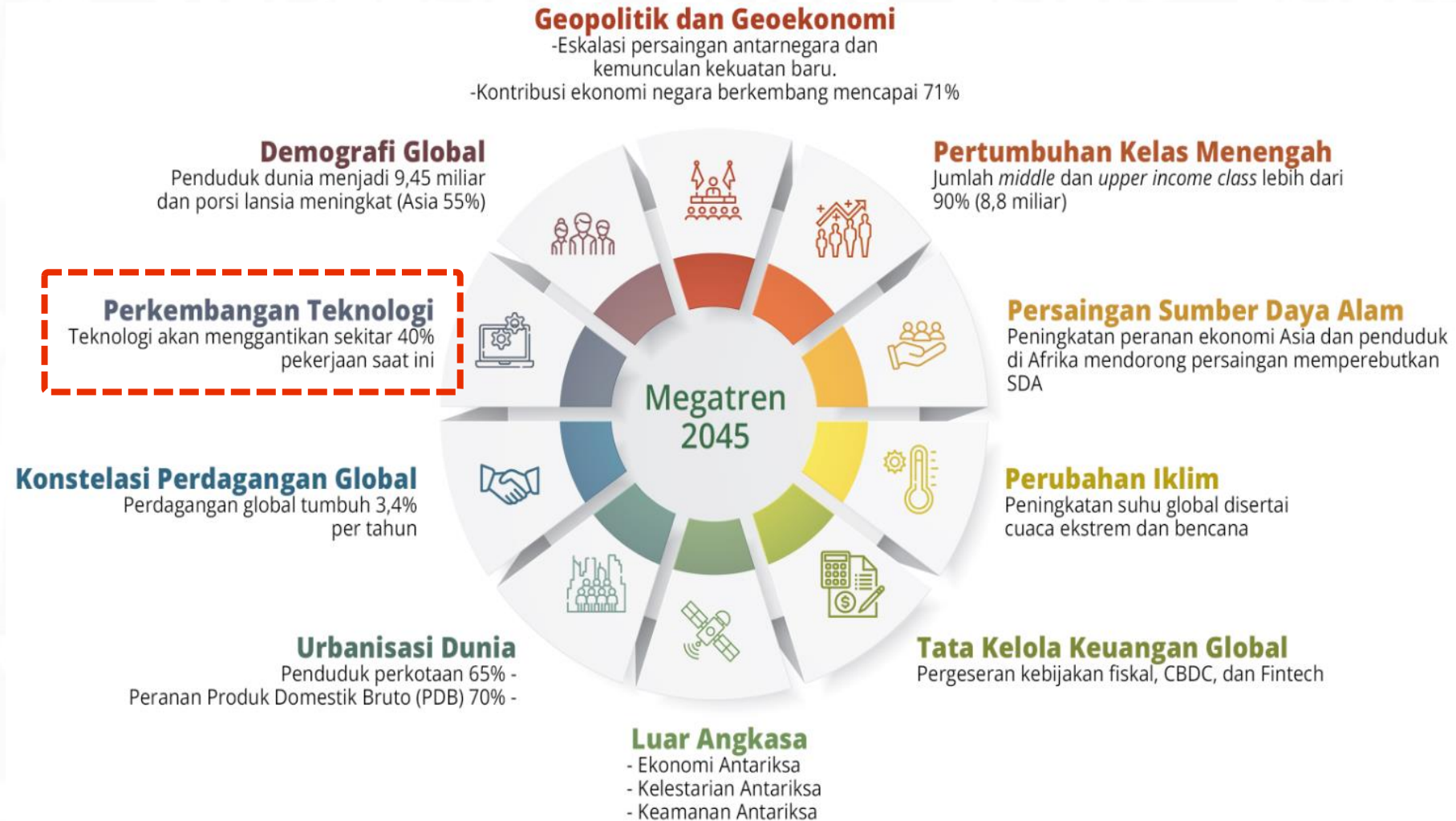


Peruri akan menyelenggarakan aplikasi SPBE Prioritas dari 9 layanan Kementerian dan Lembaga guna menjadikan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, di antaranya:

1. Layanan Pendidikan
2. Layanan Kesehatan
3. Layanan Bantuan Sosial
4. Layanan Administrasi Kependudukan
5. Layanan Transaksi Keuangan Negara
6. Layanan Administrasi Pemerintahan
7. Layanan Portal Layanan Publik
8. Layanan Satu Data Indonesia
9. Layanan Kepolisian

Tantangan Global Ke Depan

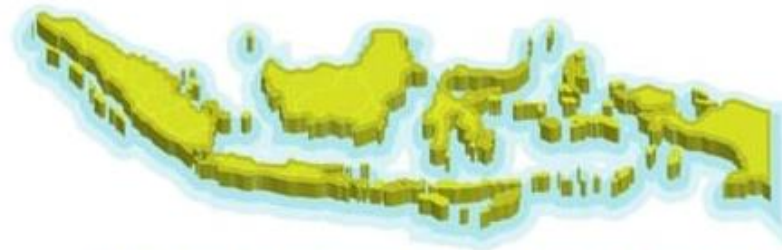
Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan **merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital**



Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Visi Indonesia 2045:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara yang mampu memanfaatkan potensi negara kepulauan untuk ketangguhan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia



Bersatu

Kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika



Berdaulat

Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman, Tangguh



Maju

Berdaya, Modern, Tangguh, Unggul, Inovatif, Adil



Berkelanjutan

Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan

Konsep Meritokrasi, Kinerja dan Integritas

STRATEGI 8/17/45 (17 AGUSTUS 1945) BERLANDASKAN PANCASILA



Sasaran Visi Indonesia Emas 2045

01 Pendapatan per kapita setara negara maju

	2025 Baseline	2045 (Target)
GNI Per Capita (USD)	5.500– 5.520	30.300
Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0
Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0

Sumber: World Bank, BPS, Bappenas (diolah)

02 Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang

	2025 Baseline	2045 (Target)
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	0,5-0,8
Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290 – 0,320
Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5

Sumber: BPS, Bappenas (diolah)

03 Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia internasional meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar

Sumber: Pareto economics, Bappenas (diolah)

04 Daya saing sumber daya manusia meningkat

	2025 Baseline	2045 (Target)
Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73

Sumber: World Bank, Bappenas (diolah)

05 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

	2025 Baseline	2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00

17 Arah (Tujuan) Pembangunan

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1. Transformasi Sosial

- IE1 Kesehatan untuk Semua
- IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata
- IE3 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Misi 2. Transformasi Ekonomi

- IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
- IE5 Penerapan Ekonomi Hijau
- IE6 Transformasi Digital
- IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- IE8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

- IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

LANDASAN TRANSFORMASI

Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- IE11 Stabilitas Ekonomi Makro
- IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- IE13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- IE14 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
- IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas
- IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- IE17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Pencapaian diukur dengan:

45
INDIKATOR
UTAMA
PEMBANGUNAN

Isu dan Tantangan: Agenda Pembangunan Regulasi dan Transformasi Tata Kelola



Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif



Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif

Belum terimplementasinya **manajemen talenta** secara merata di seluruh K/L/D



Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan

ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik



Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat



Belum meratanya **kualitas pelayanan publik**



Tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara instansi pusat dan pemerintah daerah masih belum merata

Lemahnya **integritas** masih terjadi pada **partai politik**



Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal

RPJPN 2025-2045: Sasaran Agenda Pembangunan Regulasi dan Transformasi Tata Kelola



Regulasi yang adaptif dan taat asas

difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi serta peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi

Kelembagaan yang efektif difokuskan pada penataan restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar-instansi K/L/D dan BUMN serta penataan, penguatan dan penghormatan mekanisme check balance



Proses bisnis yang adaptif difokuskan kepada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi

Manajemen talenta difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah



Meritokrasi dan integritas difokuskan pada sistem merit dalam manajemen ASN, pencegahan korupsi dan sistem pendidikan korupsi



Manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar

Layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu



Pelayanan strategis yang berkualitas

Transformasi digital difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan percepatan kesiapan digital

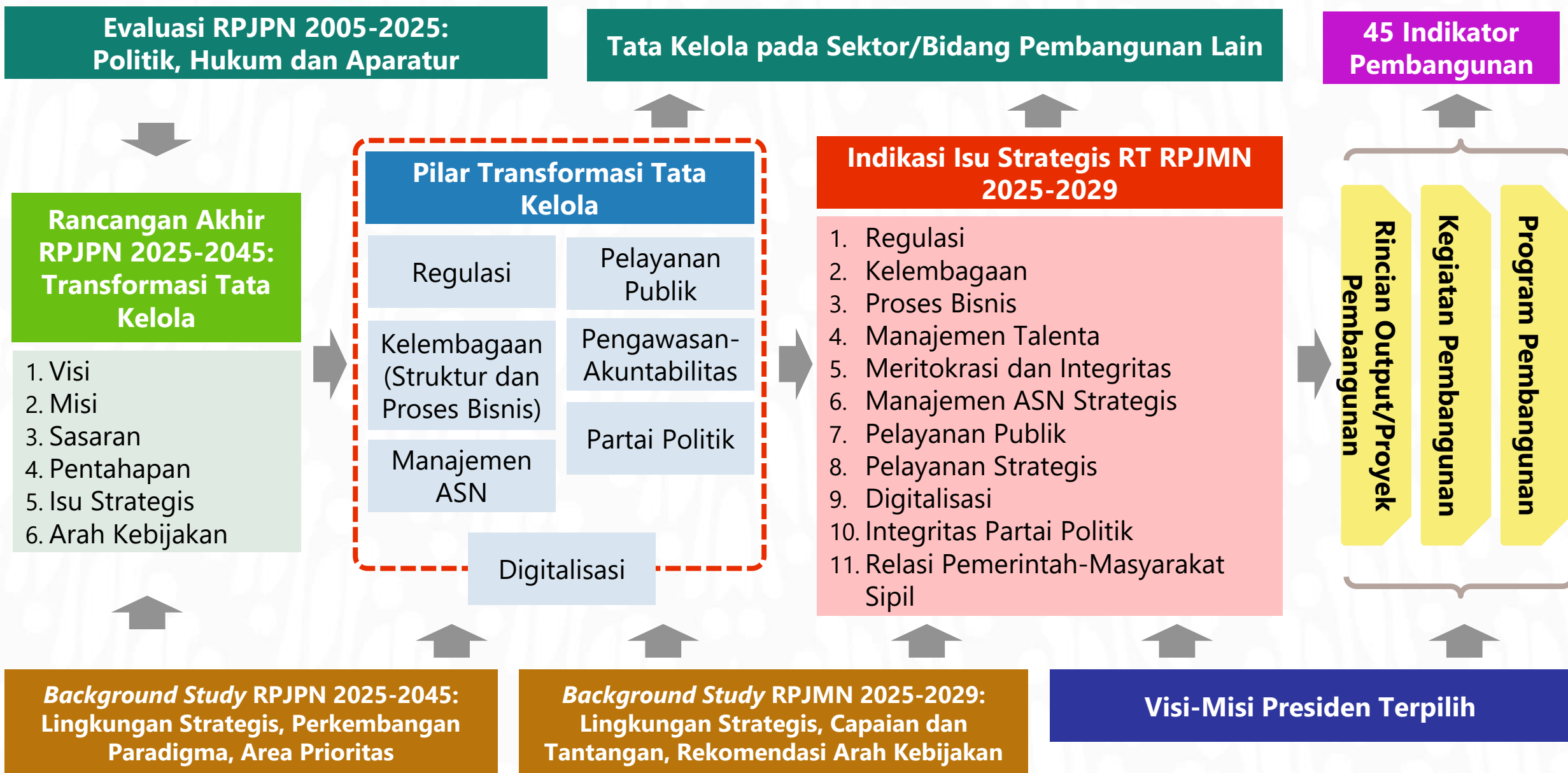


Optimalisasi partai politik dengan penguatan integritas partai politik

Relasi pemerintah dan masyarakat sipil difokuskan kepada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna



Kerangka Pikir Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 Transformasi Tata Kelola



Rancangan Teknokratis RPJMN 2025-2029: Agenda Pembangunan Regulasi dan Transformasi Tata Kelola

Agenda Pembangunan: Transformasi Tata Kelola

Sasaran: Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indikator: Indeks Materi Hukum, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional dan Indeks Persepsi Korupsi



PP: Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi

Sasaran: Terwujudnya Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi dan Penguatan Tata Kelola Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas

PP: Penataan Proses Bisnis, Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan

Sasaran: Terwujudnya Struktur dan Proses Bisnis yang Efektif dan Efisien

PP: Transformasi Manajemen ASN

Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan ASN Berbasis Merit



PP: Kesejahteraan dan Sistem Penggajian Tunggal ASN

Sasaran: Terwujudnya ASN yang Profesional dan Sejahtera

PP: Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

PP: Sistem Anti-Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan

Sasaran: Terwujudnya Penguatan Kerangka Hukum dan Sistem Pemberantasan Korupsi serta Tata Kelola Pengawasan dan Akuntabilitas yang Efektif dan Akuntabel

PP: Penguatan Integritas Partai Politik

Sasaran: Terwujudnya Integritas Partai Politik

Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029: Transformasi Tata Kelola

PP: Penataan Proses Bisnis, Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan

KP: Penyederhanaan dan Penguatan Proses Bisnis Pemerintah

KP: Penataan Kelembagaan Program Pembangunan dan Prioritas Nasional

KP: Harmonisasi dan Kolaborasi Kewenangan dan Keuangan Pusat dan Daerah

PP: Transformasi Manajemen ASN

KP: Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Manajemen ASN

KP: Pengembangan Kompetensi ASN

KP: Manajemen Talenta dan Karir ASN

PP: Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik

KP: Digitalisasi Pelayanan Publik

KP: Pengembangan Talenta Digital Pelayanan Publik

KP: Penguatan Ekosistem Digital Pelayanan Publik

KP: Perluasan Akses Pelayanan Publik

PP: Kesejahteraan dan Sistem Penggajian Tunggal ASN

KP: Penggajian Tunggal ASN

KP: Reformasi Sistem Pensiun ASN

KP: Penghargaan dan Pengakuan Non-Material

8 Misi (Asta Cita)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastuktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan**
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

8 Program Hasil Terbaik Cepat

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional
4. Melanjutkan program KIS, KIP, KS, prakerja, PKH Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

30. Meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas
31. Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial
32. Mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru
33. Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (*tax ratio*)
34. Mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah
35. Menghentikan praktik manipulasi (*misinvoicing*) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (*smelter*, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya)
36. Memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional, serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal
- 37. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien**
38. Pembebasan pajak penghasilan selama tiga tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi
39. Ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

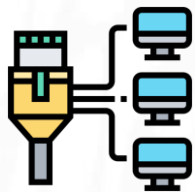
40. Memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final
41. Memperbaiki produktivitas perekonomian dengan tujuan memperbaiki angka ICOR (*Incremental Capital to Output Ratio*)
42. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif
43. Meningkatkan harmonisasi kebijakan sektor moneter (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), sektor fiskal, dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia
44. Menguatkan manajemen BUMN yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis
45. Membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain
46. Memastikan tata kelola Migas dan Pertambangan Nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD1945
47. Membangun database aset dan kekayaan kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah, serta peta potensi kekayaan SDA
- 48. Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft* kompetensi ASN maupun APH**
- 49. Memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi para pegawai ASN**
- 50. Memperkuat kepemimpinan, budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi ASN menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung**

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

51. Mempermudah akses belajar bagi pegawai ASN sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital
52. Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai ASN untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta, yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karir seorang pegawai ASN
53. Memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep *Total Reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja dan kesempatan untuk berkembang bagi ASN
54. Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta
55. Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN dalam *platform* digital yang terintegrasi secara nasional

Isu Strategis

- Infrastruktur digital atau akses internet yang terbatas dan belum memadai di daerah perdesaan dan terpencil
- Kurangnya keterampilan digital di antara tenaga kerja dan masyarakat luas
- Serangan siber, pencurian data, dan kebocoran informasi menjadi risiko yang nyata
- Kerangka kebijakan yang belum jelas untuk mengatasi isu-isu seperti perlindungan data, privasi, e-Commerce dan inovasi teknologi



Arah Kebijakan Transformasi Digital

- Pembentukan regulasi dan institusi untuk dasar pengembangan transformasi digital
- Pengembangan sisi suplai (seperti pengembangan infrastruktur dan layanan digital secara merata, berkualitas, dan inklusif)
- Pengembangan pemanfaatan digital
- Penguasaan teknologi digital berbasis riset dan inovasi digital
- Pengembangan sistem pembiayaan dan insentif yang mendukung transformasi digital
- Keterpaduan data (Satu Data Indonesia)
- Penguatan keamanan siber
- Pembentukan *superplatform* digital Indonesia
- Pengembangan industri digital untuk penguatan sisi suplai transformasi digital

Penerapan Layanan Berbasis Siklus Hidup Manusia



Pelayanan Publik

Pengembangan Usia Dini – Holistik Integratif (PAUD-HI)

Bayi



Pembayaran Digital

Usia Dini



Akta Pernikahan

Surat Ijin Mengemudi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Dewasa

Akta
Kematian

Prenatal

**0 – 11
Bulan**

**12 – 59
Bulan**

6 Tahun

7 – 18 Tahun

19 – 59 Tahun

**60 Tahun
Ke Atas**

Balita

**Anak Usia Sekolah
dan Remaja**

Lansia

Akta Kelahiran

Pelayanan Kesehatan Primer

Wajib Belajar 13
Tahun

Akta Perceraian
Pendidikan Tinggi
Surat Izin Usaha

Jaminan Kesehatan Nasional, Pengendalian Penyakit, Bantuan Gizi, Bantuan Sosial, Asistensi dan Rehabilitas Penyandang Disabilitas



Rancangan Awal RPJMN 2025-2029: Transformasi Tata Kelola

Program Prioritas (PP): Peningkatan Kesejahteraan, Integritas, dan Kompetensi ASN

Kegiatan Prioritas (KP):

1. Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH
2. Memperbaiki sistem penganggaran yang mendorong peningkatan kinerja dan kompetensi para pegawai ASN
3. Mempermudah akses belajar bagi pegawai ASN sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital
4. Memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai ASN untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta, yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karir seorang pegawai ASN
5. Memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep Total Reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja dan kesempatan untuk berkembang bagi ASN
6. Memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta
7. Memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian ASN dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional

Program Prioritas (PP): Pemerintahan Digital

Kegiatan Prioritas (KP):

1. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien
2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Digital (RT)
3. Penguatan Fondasi Pemerintahan Digital (RT)
4. Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN (RT)
5. Digitalisasi Layanan Publik Prioritas (RT)
6. Pengembangan Ekosistem Layanan Publik

Program Prioritas (PP): Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan

Kegiatan Prioritas (KP):

1. Memperkuat kepemimpinan, budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi ASN menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung
2. Tata Kelola Pelayanan Publik (RT)
3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis (RT)
4. Manajemen Kinerja Pembangunan (RT)
5. Manajemen Risiko Pembangunan

Peluang Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Digital



Broadband (High Bandwidth and Low Latency)



Komputasi Awan (Cloud Computing)



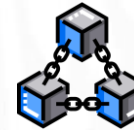
Internet of Things (IoT)



Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence)



Maha Data (Big Data)



Blockchain

1

Teknologi berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat melalui efisiensi dan kesempatan baru

2

Kemajuan teknologi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Pekerjaan yang sifatnya rutin, manual dan kognitif akan berkurang

3

Indonesia perlu memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembangunan dengan meminimalkan disrupsi

Perbedaan Generasi Berdasarkan Tahun Kelahiran



Generasi ini tumbuh pada masa **ketidakpastian ekonomi** dan **perubahan sosial**



Generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya di **era digital**



Baby Boomers

Generasi X

Generasi Y

Generasi Z

Generasi Alpha

1945

1965

1980

1995

2010

Generasi ini tumbuh setelah perang dunia ke-2 serta ditentukan oleh **perubahan sosial** yang mengarah pada **persaingan** yang ketat dan mementingkan **kebebasan**



Generasi pertama yang tumbuh dengan **akses** terhadap **teknologi** dan **internet**



Generasi pertama yang lahir sepenuhnya pada era digital yang disertai dengan **pesatnya kemajuan teknologi** dan **penggunaan internet**

Tantangan Lingkungan Eksternal: The Top 20 Skill to Develop by 2027 (*World Economic Forum*)

- 1 Creative Thinking
- 2 Analytical Thinking
- 3 Technological Literacy
- 4 Curiosity and Lifelong Learning
- 5 Resilience, Flexibility and Agility
- 6 System Thinking
- 7 Artificial Intelligence and Big Data
- 8 Motivation and Self-Awareness
- 9 Talent Management
- 10 Service Orientation and Customer Service
- 11 Leadership and Social Influence
- 12 Empathy and Active Listening
- 13 Dependability and Attention to Detail
- 14 Resource Management and Operations
- 15 Networks and Cyber Security
- 16 Quality Control
- 17 Design and User Experience
- 18 Teaching and Mentoring
- 19 Environmental Stewardship
- 20 Programming

Kendala Utama Keterampilan Digital Indonesia

Inklusi Digital

- Pengguna internet **terkonsentrasi di pusat kota Pulau Jawa**
- **Pengguna internet umumnya berusia muda** (sekitar 77% berusia 10-29 tahun)
- **Penyandang disabilitas** kurang menggunakan internet (hanya sekitar 18% yang memiliki akses internet)
- **Perbedaan gender** mempengaruhi akses ke internet (wanita dan anak Perempuan menggunakan internet 11% lebih sedikit dari pria dan anak laki-laki)
- Individu dengan **tingkat pendidikan yang lebih tinggi** cenderung lebih tinggi mengakses internet
- **Tingkat pendapatan** mempengaruhi peluang dalam menggunakan internet

Literasi Digital

- Skor Indonesia masih rendah pada aspek utama **kompetensi pengembangan digital** (hanya 30% pelajar Indonesia memiliki kemampuan membaca di atas level 2 dibandingkan dengan rata-rata OECD sebesar 77%)
- **Hasil pendidikan** bervariasi antar-daerah (daerah perdesaan dan 3T menunjukkan tingkat penyelesaian sekolah terendah)
- Penerapan **high order thinking skills** (HOTS) yang ingin diintegrasikan Kemendikbud di semua mata pelajaran sekolah menimbulkan sejumlah tantangan terutama terkait penghapusan pilihan mata pelajaran yang berdiri sendiri khususnya mata pelajaran IT

Tenaga Kerja Digital

- Lebih dari separuh angkatan kerja memiliki **tingkat pendidikan rendah**
- **Tingkat digitalisasi** masih rendah dengan jaranganya kegiatan penelitian untuk memobilisasi dan meningkatkan model bisnis
- **Kualitas kurikulum** di tingkat pendidikan menengah dan pasca-sekolah tidak cukup mencerminkan kebutuhan industri
- **Program pelatihan** yang dapat diakses hanya tersedia untuk individu dengan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi
- Beberapa **pusat latihan kerja milik pemerintah (BLK)** diorientasi oleh pemerintah
- **Sertifikasi pelatihan** tidak selalu diakui dalam perekrutan talenta

Kerangka Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi

DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- Business Intelligence
- Data Engineering
- Machine Learning Engineering
- Data Science/AI Science
- AI Applied Research

INFRASTRUCTURE

- Plan and Design
- Build and Maintenance

SOFTWARE AND APPLICATION

- Software Engineering
- Embedded Systems Engineering
- User Interface Design

CYBER SECURITY

- Governance Risk and Control
- Vulnerability Assessment and Penetration Testing
- Security Operations
- Forensics Investigation
- Incident Response
- Threat Analysis
- Security Design and Engineering

OPERATIONS SUPPORT

- Infrastructure Support
- Systems Support
- Database Support
- Data Center and Operations Centre Support
- Applications Support

STRATEGY AND GOVERNANCE

- Enterprise Architecture
- Program and Project Management
- Product Management
- Quality Management
- Data Protection
- IT Audit

SALES AND MARKETING

- Pre-Sales
- Sales
- Customer Success

Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan dan Perguruan Tinggi di Indonesia

JENIS PENDIDIKAN TINGGI

AKADEMIK

Berbasis pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu dengan mencakup S1, S2, dan S3

VOKASI

Berbasis pada penguasaan keahlian terapan tertentu, mencakup D1, D2, D3, dan D4

PROFESI

Hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan Sarjana untuk dapat menguasai keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menjadi profesi yang relevan

JENIS PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS

Terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dengan banyak rumpun ilmu

INSTITUT

Terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dengan satu keilmuan saja

SEKOLAH TINGGI

Terdiri dari hanya satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi

POLITEKNIK

Hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan beberapa cabang ilmu

AKADEMI

Hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan satu cabang ilmu

1 Keterampilan Digital (*Digital Skill*)

Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari

2 Budaya Digital (*Digital Culture*)

Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari

3 Etika Digital (*Digital Ethics*)

Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan pengembangan etika digital dalam kehidupan sehari-hari

4 Keamanan Digital (*Digital Safety*)

Kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari

Harapan Dampak Masa Depan Pemanfaatan Platform Digital Pemerintah

Masyarakat (*Citizen*)

Masyarakat dapat mengakses semua layanan publik melalui satu saluran atau portal. Pemberian layanan yang bersifat personal, proaktif, dan inklusif dapat memaksimalkan aksesibilitas dan kemudahan untuk mengurangi titik buta (blind spot) pemberian layanan kesejahteraan sosial



Pemerintah (*Government*)

Pemerintah dapat menghilangkan silo birokrasi dan mengoptimalkan alur kerja pemerintah dengan data dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence, AI*) untuk kewajaran, keandalan, dan transparansi yang lebih baik

Ekosistem Inovasi Berdasarkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Inovasi pemerintahan digital dapat menjadi pintu gerbang menuju dunia yang lebih baik bagi masyarakat, dengan menggunakan teknologi digital secara etis dan aman untuk mencapai potensi penuh perkembangan masyarakat



Dunia Usaha (*Business*)

Dunia usaha akan mampu mengembangkan dan menyediakan berbagai layanan inovatif dengan data pemerintah yang terbuka dan kerjasama pemerintah dan badan usaha yang selanjutnya akan menciptakan lebih banyak nilai tambah dan memunculkan bisnis baru



Pengambilan Keputusan Berbasis Data dan Pemerintahan Berbasis Pengetahuan (*Data-Driven and Scientific Government*)

Data sebagai aset strategis utama dalam menghasilkan nilai publik melalui penerapannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan publik



Proaktif dan Layanan Berbasis Individu (*Proactive and Personalized Services*)

Sikap proaktif dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dan ASN untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan meresponsnya dengan cepat



Terima Kasih

